

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN PILANGBANGO TAHUN 2024**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA TIDAK DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf H dan J ; b. UU no 43 Tahun 009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan / pihak berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan :	a UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17;	- Selama masih berlaku	- Menghambat proses penegakan hukum	- Menyediakan data lengkap yang dilindungi proses penegakan hukum
	a. Dokumen Keuangan :	b UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	- Selama masih berlangsung penyelenggaraan	Mengganggu kepentingan perlindungan hak	- Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
	- SPJ berikut lampirannya dokumen	c UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf l	- Selama status perlindungan masih berlaku	- Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi pribadi	- Merencanakan proses pelaksanaan kegiatan
	anggaran	d UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)	- Sampai dengan proses penyelesaian konflik	- Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	- Surat pencairan anggaran	e UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a.		- Dapat Menghambat proses penyusunan kebijakan	
	b. Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat				
	c. Memorandum/surat – surat penting yang perlu dirahasiakan				
	d Disposisi surat pimpinan				
e dokumen penyelesaian sengketa / konflik tanah					
3	Data Pribadi Penduduk KK dan NIK	a UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf l b UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat 1 dan 2, Pasal 85 Ayat 1, 2 dan 3 c UU no 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat 1, Pasal 79 Ayat 1	Permanen / atas ijin yang bersangkutan / kepentingan publik yang berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik	- Mengungkap rahasia pribadi - Berpotensi disalah gunakan	Melindungi data pribadi

4	Penilaian Kinerja / Prestasi Kerja Pegawai	PP nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS - S	Selama masih berlaku	Dapat disalah gunakan	Bisa menjaga keakuratan dan obyektifitas PNS
5	Keputusan Ijin/ keterangan tentang perceraian PNS	a UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf l b UU no 8 Tahun 1974 Tentang Perkawinan c PP Tahun 83 Jo, PP 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Mengungkaprahasiapribadi Dapatmengham,bat proses penyusunankebijakan	- Melindungi rahasia pribadi PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
6	Data pribadi Penduduk	a UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP , pasal 17 huruf H b UU no 23 Tahun 2006	Selama masih berlaku	Data Pribadi bisa disalah gunakan	Melindungi data pribadi
7	Data Objek Pajak dan Retribusi -UU	a. UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40 b. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j.	Sampal ada printah penegak hukum yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengamankan database obyek pajak
8	Laporan PajakPribadi (LP2P)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia kekayaan pribadi	Melindungi rahasia kekayaan pribadi
9	Kode / Akses Password Aplikasi Elektronik	UU no 11 ITE Pasal 30 ayat 1, 2 ,3	Permanen	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi dan mengamankan data

LURAH PILANGBANGO

REKAMATAKARTORANGKABUPATEN
KABUPATEN KARTORANG
KABUPATEN KARTORANG

MUJONO, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 197904121992031003